

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi ekonomi yang terjadi pada saat sekarang telah menimbulkan persaingan pada setiap sektor perekonomian, termasuk sektor perbankan. Dampak dari globalisasi ekonomi membuat setiap negara bebas melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain selama mematuhi hukum yang berlaku. Globalisasi pada sektor keuangan di Indonesia sudah mulai terlihat sejak tahun 1988, yaitu setelah adanya fakto 88.

Setelah deregulasi 27 oktober 1988, perkembangan sektor perbankan di Indonesia banyak mengalami perubahan, baik dalam perkembangan jumlah bank, perluasan kantor cabang, serta jasa yang ditawarkan menjadi lebih beragam. Perkembangan yang terjadi di sektor perbankan ini disebabkan oleh isi fakto 88 yang memberikan beberapa kemudahan bagi industri perbankan, diantaranya yaitu peraturan yang awalnya ketat menjadi diperlonggar, dan dipermudahnya perizinan pendirian kantor cabang.

Salah satu tujuan dikeluarkannya fakto 88 adalah untuk menciptakan kondisi perbankan yang efisien serta terbentuknya iklim usaha yang sehat, supaya dapat mendorong sektor ekonomi ke arah yang lebih baik. Mengingat peran vital bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan modal. Apabila lembaga ini berperan dengan baik dan efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya, maka dengan sendirinya tercipta perekonomian yang produktif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dapat dilihat dalam tabel berikut;

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga (DPK)	
Tahun	Bank Umum
2008	1.753.292
2009	1.973.042
2010	2.338.824
2011	2.784.912
2012	3.225.198
2013	3.663.968
2014	4.114.420

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015 (dalam miliar rupiah)*

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya perkembangan setiap tahun, *trend* positif ini membuktikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan di Indonesia.

Setelah menghimpun dana kemudian bank meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum dalam beberapa waktu terakhir terlihat dalam tabel berikut;

**Tabel 1.2**  
**Gambaran Kegiatan Bank Umum Dalam Menyalurkan Dana**

Penyaluran Dana	
Tahun	Bank Umum
2008	2.015.221
2009	2.282.179
2010	2.765.912
2011	3.412.463
2012	4.172.672
2013	4.823.303
2014	5.468.910

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015 (dalam miliar rupiah)*

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana seperti yang terlihat dalam Tabel 1.2 menunjukkan *trend* positif, karena jumlah dana yang disalurkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah bank yang ada di Indonesia menurut Bank Indonesia (BI) sampai tahun 2015 sebanyak 118 bank, terdiri dari bank milik pemerintah (BUMN), milik swasta nasional, dan bank milik asing. Banyaknya jumlah bank di Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan ekonomi, walaupun demikian bank milik pemerintah diharapkan memiliki kontribusi lebih dibandingkan dengan bank lain.

Maju dan berkembangnya bank milik pemerintah diharapkan bisa bersinergi dengan pembangunan ekonomi, karena seluruh keuntungan yang diperoleh bisa dipergunakan untuk kegiatan yang produktif sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-undang, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bank diharapkan mampu menjalankan

fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal.

Menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan merupakan cerminan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Meningkatnya jumlah dana yang dihimpun, serta tingginya angka penyaluran dana oleh bank harus diikuti dengan efisiensi dari bank itu sendiri. Secara umum efisiensi bank dapat terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Persentase BOPO bank umum setiap tahunnya terus mengalami perubahan seperti yang terlihat dalam Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Persentase BOPO Bank Umum**

BOPO (%)	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	86,59	86,62	86,14	85,42	74,10	74,08	76,29

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015*

Efisiensi merupakan salah satu parameter yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Pada perbankan, BOPO menjadi salah satu acuan dalam melihat tingkat efisiensi secara umum. Tingkat efisiensi bank umum di Indonesia yang tercermin dalam Tabel 1.3 menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tidak sesuai dengan target ideal Bank Indonesia, yaitu sebesar 60-70%. Tingginya nilai BOPO memperlihatkan tidak efisiennya bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan kinerja bank untuk waktu yang akan datang.

Pada saat pengukuran efisiensi bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang maksimum dengan tingkat input yang ada, atau memanfaatkan tingkat input yang minimum guna menghasilkan tingkat output tertentu. Efisiensi dalam perbankan perlu dilakukan mengingat persaingan yang terjadi di industri perbankan sangat ketat, dengan adanya efisiensi dalam perbankan diharapkan memberikan dampak positif terhadap kemajuan bank tersebut.

Menurut amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN memiliki beberapa peran diantaranya memberikan sumbangan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi secara nasional dan menjadi sumber pendapatan negara dari pendapatan nonpajak untuk mengisi kas negara, sehingga bank milik pemerintah sebagai salah satu BUMN diharapkan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian negara. Oleh sebab itu, efisiensi dalam bank terutama milik pemerintah perlu dilakukan agar semua input yang dimiliki dapat menghasilkan output semaksimal mungkin, sehingga bank milik pemerintah dapat bersaing dengan bank milik swasta nasional dan juga dengan bank milik asing.

Jumlah bank milik pemerintah baik yang bersifat konvensional dan syariah pada tahun 2015 sebanyak delapan bank. Bank pemerintah yang bersifat konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Sedangkan bank pemerintah yang berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTN Syariah.

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan *Data envelopment analysis* (DEA). Seperti yang telah dilakukan oleh Faza & Nadrattuzaman (2013), yang meneliti tentang efisiensi bank umum syariah. Jumlah yang diteliti sebanyak sepuluh bank mulai dari kuartal II 2010-kuartal IV 2012.

Hasil pengukuran tingkat efisiensi menunjukkan suatu *trend* yang fluktuatif, sehingga tidak ada Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki *score* efisiensi yang stabil dari setiap waktu pengukuran. Bank yang dikategorikan efisien dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah pada kuartal I, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia pada kuartal III, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Jabar Banten Syariah pada kuartal IV, Bank Panin Syariah pada kuartal VI, Bank BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Syariah pada kuartal VII, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah pada kuartal VIII, Bank Panin Syariah pada kuartal X, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Panin Syariah pada kuartal XI. Sedangkan Bank Umum Syariah lainnya masih dikategorikan tidak efisien. Berdasarkan nilai efisiensi rata-rata tahunan bank

umum syariah terlihat bahwa sepuluh bank yang menjadi objek dalam penelitian belum efisien.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Moch Fathony (2012), tentang Estimasi dan faktor –faktor yang mempengaruhi efisiensi bank domestik dan asing di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa bank yang dimiliki asing memiliki tingkat efisiensi kinerja yang lebih tinggi dibandingkan milik domestik, hal ini dikarenakan bank milik asing memiliki jaringan dan manajemen berskala internasional dengan praktik *coporate government* dan *skill* yang lebih tinggi.

Penelitian juga dilakukan oleh Sutawijaya Adrian & Puji Lestari Etty (2009), tentang efisiensi teknik perbankan di Indonesia pasca krisis. Hasilnya menunjukkan rata-rata pencapaian efisiensi mengalami penurunan dan bank milik pemerintah yang menjadi salah satu objek penelitian seperti Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN memiliki efisiensi rata-rata dari tahun 2000-2004 dibawah 100% atau tidak efisien.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Permana (2013), tentang perbandingan tingkat efisiensi bank milik pemerintah dengan bank milik asing selama periode 2007-2001 menggunakan analisis DEA dan pendekatan CRS, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi Bank MANDIRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI dibawah 100% atau tidak efisien.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti efisiensi bank milik pemerintah (BUMN), hal ini dikarenakan BUMN sebagai salah satu pendapatan negara diluar pajak, jika bank milik pemerintah memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, maka bank tersebut dapat memaksimalkan inputnya guna mendapatkan laba yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian negara, oleh sebab itu penulis melakukan penelitian tentang ***“ANALISIS EFISIENSI BANK MILIK PEMERINTAH MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi bank milik pemerintah baik yang bersifat syariah maupun konvensional pada periode 2010-2014?
2. Bagaimana analisis inefisiensi bank milik pemerintah pada periode 2010-2014?
3. Bagaimana perbandingan tingkat efisiensi antara bank milik pemerintah yang bersifat syariah dan konvensional pada periode 2010-2014?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efisiensi bank milik pemerintah baik yang bersifat syariah maupun konvensional pada periode 2010-2014.
2. Untuk mengetahui analisis inefisiensi bank milik pemerintah pada periode 2010-2014.
3. Untuk mengetahui perbandingan tingkat efisiensi antara bank milik pemerintah yang bersifat syariah dan konvensional pada periode 2010-2014.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi tentang perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai efisiensi industri perbankan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi pengelola perbankan

Dapat memberikan gambaran tentang efisiensi bank milik pemerintah, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang memudahkan bagi pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi tentang gambaran kinerja bank yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam dunia perbankan.